



# Pemda DIY Timbang Untung Rugi PSEL

**JOGJA**—Pemda DIY masih menimbang untung rugi program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) alias *Waste to Energy* (WTE).

Lugas Subarkah & Yosef Leon  
 redaksi@harianjogja.com

Meski Bumi Mataram menjadi daerah yang diprioritaskan untuk program WTE, produksi sampah di DIY rata-rata hanya 700 ton per hari. Padahal program tersebut membutuhkan 1.000 ton sampah per hari.

Jika program itu diterapkan, otomatis fasilitas pengolahan sampah lainnya yang telah dibangun daerah kemungkinan berhenti.

Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan sesuai namanya, program PSEL akan menangani sampah menjadi energi listrik, dengan syarat minimal 1.000 ton sampah per hari.

la memandang program dari Pemerintah Pusat ini ada positif dan negatifnya, sehingga Pemda DIY pun saat ini belum memutuskan kelanjutan program ini.

► Halaman 10

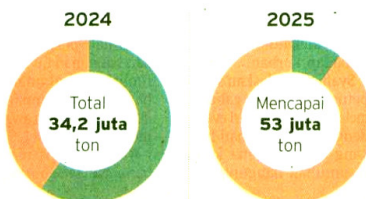
► Produksi sampah di DIY rata-rata hanya 700 ton per hari.

► PSEL secara normatif kemungkinan baru bisa mulai beroperasi pada 2028 meski bisa dipercepat.

## KONDISI SAMPAH DI TANAH AIR

Indonesia tengah mengalami kondisi darurat dalam penanganan sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), pada 2024, banyak sampah yang belum dikelola dengan baik.

### VOLUME SAMPAH



### LOKASI

317 kabupaten/kota



### VOLUME SAMPAH

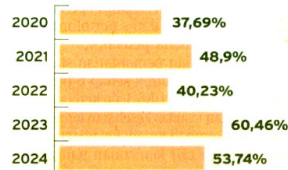
setiap hari 146.000 ton

Dari jumlah ini, hanya sekitar 9% hingga 10% yang benar-benar dikelola.

### JENIS SAMPAH

Dalam 5 tahun terakhir, sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar.

### KONTRIBUSI SAMPAH RUMAH TANGGA



### KONDISI TPA

Volume sampah di TPA di seluruh Indonesia mencapai 1,6 miliar ton



Tumpukan tersebut terus bertambah setiap tahunnya dengan tambahan 56,3 juta ton sampah baru.

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup/JIBI | Grafik: Harian Jogja/Sunu Jatmika

## Pemda DIY...

"Positifnya kami tidak perlu [berpikir] soal sampah. Tidak ada pemilahan, langsung jadi energi listrik. Persoalannya itu kontrak 30 tahun. Jadi kalau sudah sepakat, dalam jangka waktu 30 tahun komitmennya per hari harus menyiapkan 1.000 ton sampah," ujarnya, Rabu (1/10).

Sedangkan produksi sampah dari Kota Jogja, Sleman dan Bantul yang biasa masuk TPA Piyungan selama ini rata-rata hanya 700 ton per hari. Jumlah tersebut memang masih bisa bertambah sekitar 1.300 ton per hari jika sampah dari Sleman dan Bantul dimaksimalkan.

"Kalau kami tidak memenuhi syarat ada *punishment*. Karena ini kan juga usaha, ada profit di situ. Nah untuk mengkonsistensikan jumlah itu kami tidak bisa menjamin. Sedangkan kabupaten/kota itu kan sudah dengan berbagai cara, salah satunya dengan RDF, mengolah sampah menjadi bahan bakar. Itu kan juga termasuk pemberdayaan," katanya.

Pemda DIY menurutnya ingin pengolahan sampah bisa lebih beragam, tidak semuanya menjadi energi listrik mengingat DIY saat ini juga sudah *oversupply* energi listrik. "Misalnya bisa listrik, bisa biomassa. Tapi ini kan bicara perusahaan dan

investor yang memang punya syarat sendiri," ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan DIY itu menambahkan ketika memutuskan untuk mengambil program ini artinya berbagai fasilitas pengolahan sampah yang telah dibangun di kabupaten dan kota selama ini kemungkinan tidak lagi difungsikan karena untuk mendukung pasokan sampah 1.000 ton per hari.

Meski demikian PSEL secara normatif kemungkinan baru bisa mulai beroperasi pada 2028 meski bisa dipercepat. Sampai PSEL bisa beroperasi, DIY harus terus mengelola sampah dengan fasilitas pengolahan sampah yang sudah ada.

Sedangkan ketika memutuskan tidak mengambil program ini, DIY harus siap untuk mengelola sampah sendiri. Saat ini Pemda DIY beserta Pemkab Sleman, Bantul dan Pemkot Jogja masih dalam proses pembahasan persoalan ini. "Tapi tetap harus cepat. Mungkin minggu depan sudah ada keputusannya," katanya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY, Kusno Wibowo, menuturkan dengan kondisi tersebut, dibutuhkan komitmen dari semua pihak khususnya Pemkot Jogja, Pemkab Sleman dan Pemkab Bantul jika akan melanjutkan program ini.

"Masih butuh koordinasi untuk komitmennya daerah dalam hal ini Kota Jogja, Sleman dan Bantul untuk peminatan terhadap rencana program pemerintah PSEL. Mungkin minggu depan DIY ketemu dengan pemerintah kabupaten-kota untuk pembahasan terkait itu," ungkapnya.

## Kesiapan Lahan

Sementara itu, Pemkab Bantul tengah mematangkan persiapan lokasi untuk pembangunan fasilitas PSEL atau WTE yang ditargetkan bisa melakukan peletakan batu pertama pembangunan fisik pada pertengahan 2026.

Lokasi yang disiapkan seluas 5,8 hektare di area eks Kelompok Badan Pengelola Unit (KBPU) di sebelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan, yang merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DIY.

Kepala DLH Bantul, Bambang Purwadi Nugroho, mengungkapkan saat ini tahapan yang menjadi fokus adalah penyiapan persyaratan, utamanya terkait lahan. Ia menambahkan sarana pendukung dan sarana angkutan (*transporter*) juga masuk dalam rencana penyiapan. "Pemerintah Kabupaten Bantul baru dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi DIY untuk menyiapkan persyaratannya, di antaranya lahan," ujar Bambang, Rabu.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 29 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005